

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Melinda Santriaty¹, Elin Erlina Sasanti², Widia Astuti³

Program Studi Akuntansi, Universitas Mataram

Email: ¹santriatymelinda@gmail.com, ²elinerlina@unram.ac.id ³widiaastutiakuntansi@unram.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 28 February 2023

Revised: 20 Maret 2023

Accepted: 27 Maret 2023

Keywords:

Financial Reports,
Accessibility of Financial Reports,
Accountability

Correspondence:

Elisa Agustin

santriatymelinda@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the presentation of financial statements and the accessibility of financial reports on regional financial management. This study uses a mixed methods approach, namely a combination of approaches that combines or connects qualitative and quantitative research methods. The research was conducted at the Mataram City Secretariat, Jl. Pejanggik No. 19 Mataram. The time for carrying out the research is within a period of 2 months from January to March 2023. The population in this study are all civil servants working at the Regional Secretariat of the City of Mataram in 2021. The sampling technique by means of purposive sampling is a sampling method taking into account certain characteristics in the population. The research sample chosen was all civil servants who were directly involved technically in managing government finances. The analytical method used was multiple linear regression analysis. The results of the partial presentation of financial statements have a positive and significant impact on regional financial management accountability. The results of the research on the accessibility of financial statements partially have a positive and significant influence on Regional Financial Management Accountability

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* yaitu kombinasi pendekatan yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Kota Mataram, Jl. Pejanggik No. 19 Mataram. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu dalam jangka waktu 2 bulan pada bulan Januari s/d Maret 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2021. Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan memperhatikan karakteristik tertentu dalam populasi. Sampel penelitian yang dipilih adalah pihak seluruh pegawai negeri sipil yang terlibat langsung secara teknis dalam pengelolaan keuangan pemerintah Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian Penyajian Laporan Keuangan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian Aksesibilitas laporan keuangan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Pendahuluan

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah bagi asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negeri Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diartikan dalam Undang- Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan isi dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan daerah

sebagai objek pembangunan dengan pemerintah daerah yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dengan adanya wewenang tersebut, bukan berarti pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kepentingan individu tanpa ada arah dan tujuan yang jelas. Hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah, pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi kepada masyarakat. Setiap daerah yang menjalankan otonom harus menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang diperolehnya dari dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Kewajiban lembaga publik memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas, transparansi, dan bertanggungjawab. Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah (Masyhur, 2017)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Fauziyah, 2017)

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem informasi akuntansi yang utuh dalam laporan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut mempunyai tujuan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan, sehingga dikembangkannya program aplikasi komputer yang diberi nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) yang digunakan pada Sekretariat Daerah Kota Mataram pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Mataram terjadi peralihan dari SIMDA ke SIPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui peraturan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sekretariat Daerah Kota Mataram digunakan sebagai lokasi penelitian karena peneliti mendapatkan akses ke pemda tersebut, belum ada penelitian terkait dan ingin mengetahui sistem informasi akuntansi tentang pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Mataram. Selain itu Sekretariat Daerah Kota Mataram merupakan OPD tertinggi di Kota Mataram dan Sekretaris Daerah merupakan kordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan SIMDA dengan SIPD yaitu (1) Pelaksanaan SIMDA merujuk Permendagri No. 13/2006 dari BPKP, sedangkan SIPD berpatokan Permendagri No. 70/2019 dari Kementerian Dalam Negeri (2) SIMDA

telah terbiasa digunakan sehingga relatif cepat adaptasi, termasuk pelaksanaan di lapangan. Sehingga pencairan APBD, untuk sebagian, diyakini lebih cepat. Sedangkan SIPD, proses penganggaran terpantau secara elektronik, termasuk perubahan prosesnya melalui admin, dan setiap daerah memiliki admin masing-masing, dengan kewenangan berbeda-beda, dimana terdapat Admin Daerah, Admin Perencanaan, juga Admin Keuangan. Admin Daerah melekat di Setda yang nantinya, Admin Daerah akan mengatur seluruh admin, termasuk *user* admin di level OPD. DPRD juga akan memiliki *password* mengakses setiap perubahan penganggaran, termasuk di OPD. Perubahan kendali Admin Daerah menyesuaikan regulasi berlaku. Sehingga fungsi DPRD, sebagai *budgeting* dan pengawasan juga terintegrasikan langsung. SIPD juga lebih detail, dan tak mengenal istilah belanja langsung dan tidak langsung. Tapi, langsung per kluster, seperti belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan sebagainya.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi seperti aplikasi SIMDA dan SIPD untuk penyajian laporan dan aksesibilitas laporan keuangan sangat membantu pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: (1) Relevan (2) Andal (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Fauziyah, 2017). Oleh karena itu, ada beberapa fenomena yang terjadi terkait antara penyajian laporan keuangan pada Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas dari sebuah laporan keuangan sangat penting bagi instansi pemerintah. Jika pemerintah memberikan informasi keuangan secara konsisten kepada masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah harus transparan dan terpercaya. Akuntabilitas terkait laporan keuangan salah satunya juga mencakup penyajian laporan keuangan, dimana pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan.

Selanjutnya, yang terjadi dalam aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan juga memiliki keterkaitan di dalamnya, akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi: (1) Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan. (2) Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah. dan (3) *Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hehanussa (2015), Fauziyah (2017), Masyhur (2017), Deviyani (2021) dan Febrianti (2019) dalam penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu penelitian terdahulu juga telah membahas mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dewi (2018), Fahmi (2020), Ulfa & Rahayu (2020) serta Susilawati (2022) dalam penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa aksesibilitas laporan keuangan

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Namun menurut Leatemia (2021), Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pemerintah daerah yang tidak membuka akses kepada *principal* (masyarakat) secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Hal ini disebabkan karena masih adanya informasi dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang menjadi rahasia negara/daerah/SKPD sehingga tidak disajikan dalam laporan keuangan yang dibuatnya. Dengan demikian aksesibilitas laporan keuangan daerah masih sangat sulit untuk didapat dan diterima oleh masyarakat

Kajian Pustaka

Teori Stewardship

Stewardship Theory yang menggambarkan situasi di mana para manajemen tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan personal/individu melainkan lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka sebagai kepentingan organisasi. Donaldson dan Davis (1991) mengasumsikan bahwa Teori Stewardship adalah suatu hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principal* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Karena itu, teori ini memiliki dasar sosiologi dan psikologis, dan tujuan rancangannya adalah untuk memotivasi para eksekutif sebagai manajer untuk bertindak sesuai dengan keinginan atasan. Selain itu, perilaku tidak akan meninggalkan organisasi karena pengurus akan berusaha keras mencapai tujuan organisasinya. Keberhasilan organisasi menggambarkan efektivitas maksimal dari tim manajemen.

Kontrak hubungan antara *stewards* (pemerintah) dan *principals* (masyarakat) atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Selain membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, pemerintah daerah (*stewards*) juga berkewajiban untuk memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara terbuka, dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa masyarakat (*principals*) berhak mengetahui informasi tersebut

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah penyajian informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.1 bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*). Penyajian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan secara baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Secara umum, laporan keuangan dibuat agar dapat dipergunakan oleh bagian keuangan untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terjadi karena salah satu faktornya adalah peningkatan penyajian laporan keuangan. Aktivitas pengelolaan sumber daya daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan melalui penyajian laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, di mana keterbukaan tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta prinsip dan regulasi yang telah

ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip akuntansi berterima umum juga merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan karena merupakan salah satu faktor yang meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hehanussa, 2015)

Berdasarkan pengertian di atas bahwa penyajian laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan seluruh transaksi keuangan yang sudah dilakukan suatu entitas sektor publik (pemerintah), memberikan suatu informasi sebagai menentukan serta memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan, memonitor kinerja perencanaan serta penganggaran sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Fikrian (2017) aksesibilitas adalah hubungan yang tersedia dari satu tempat ke tempat lainnya. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah tidak hanya disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah saja tetapi juga memfasilitasi masyarakat agar memperoleh serta mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi laporan keuangan yang mudah diperoleh oleh pemangku kepentingan merupakan sebuah aksesibilitas laporan keuangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat". Pelaksanaan amanat undang-undang tersebut dapat dilakukan dengan cara pemerintah membuka akses mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan, salah satunya adalah menerbitkan laporan keuangan pada laman resmi pemerintah. Sedangkan menurut Permendagri No. 21 Tahun 2010 pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan untuk mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang telah dibuat oleh unit pemerintah yang artinya dengan memberikan kemudahan akses kepada laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi.

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah (*stewards*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik tersebut antara lain: 1) Hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki definisi kewajiban mengungkapkan kegiatan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik oleh pemerintah sebagai pihak yang mendapat amanat dari rakyat.

Sistem Informasi Manajemen Daerah

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merujuk pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliabel), yaitu

sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa SIPD ialah pengelolaan suatu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang masih berkorelasi dalam urusan penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini menjadi tumpuan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan serta penganggaran pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Data SIPD ini terdiri dari 8 (delapan) (data umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik/hukum/ keamanan dan insidental), 31 jenis data, dan 2691 elemen data.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mixed methods* yaitu kombinasi pendekatan yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (Sugiyono 2015). Hasil penelitian dengan angka-angka untuk variabel (*independen*) yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan yang mempengaruhi variabel yang lain (*dependen*) yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Serta menggunakan deskriptif karena peneliti bertujuan untuk menggambarkan persepsi pegawai negeri sipil Sekretariat Daerah kota Mataram terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah setelah penerapan SIPD. Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Kota Mataram, Jl. Pejanggik No. 19 Mataram. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu dalam jangka waktu 2 bulan pada bulan Januari s/d Maret 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2021. teknik pengambilan sampel dengan cara tidak menyediakan peluang yang sama untuk setiap anggota populasi dalam pemilihan sampel. Metode *purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan memperhatikan karakteristik tertentu dalam populasi. Sampel penelitian yang dipilih adalah pihak seluruh pegawai negeri sipil yang terlibat langsung secara teknis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan kualifikasi kepala bagian dan staf/bagian keuangan daerah yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun. Sampel pada penelitian ini adalah kepala Bagian berjumlah sembilan orang, Bendahara Setda Kota Mataram, Bendahara Bagian berjumlah sembilan orang, keseluruhan pegawai bagian umum (subbagian keuangan) yang berjumlah empat orang, dan Kepala Sub Bagian yang berjumlah dua puluh tujuh orang di Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2021. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Sebelum dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis (Uji F dan Uji T).

Hasil Dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r_{tabel} untuk degree of freedom (df) = $n-2$ dengan α 0,05, n adalah jumlah sampel (Ghozali,2013). Dalam penelitian ini $df = n-2$ sehingga $45-2 = 43$, didapatkan r_{tabel} untuk $df(43) = 0,2940$

Penyajian Laporan Keuangan

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan (X1)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	R tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,646	0,2940	Valid
2	Pernyataan 2	0,586	0,2940	Valid
3	Pernyataan 3	0,748	0,2940	Valid
4	Pernyataan 4	0,640	0,2940	Valid
5	Pernyataan 5	0,671	0,2940	Valid
6	Pernyataan 6	0,767	0,2940	Valid
7	Pernyataan 7	0,816	0,2940	Valid

Sumber: Data Primer, diolah (2023)

Tabel 1, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen di dalam variabel penyajian laporan keuangan yang di uji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan di anggap valid karena $\text{corrected item-total correlation} > r_{\text{tabel}}$ pada signifikan 0,05 (5%)

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	R tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,744	0,2940	Valid
2	Pernyataan 2	0,762	0,2940	Valid
3	Pernyataan 3	0,889	0,2940	Valid
4	Pernyataan 4	0,876	0,2940	Valid

Sumber: Data Primer, diolah (2023)

Berdasarkan tabel 3 hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen di dalam variabel aksesibilitas laporan keuangan yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena $\text{corrected item-total correlation} > r_{\text{tabel}}$ pada signifikan 0,05 (5%)

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	R tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,653	0,2940	Valid
2	Pernyataan 2	0,716	0,2940	Valid
3	Pernyataan 3	0,594	0,2940	Valid
4	Pernyataan 4	0,727	0,2940	Valid
5	Pernyataan 5	0,740	0,2940	Valid
6	Pernyataan 6	0,812	0,2940	Valid
7	Pernyataan 7	0,837	0,2940	Valid
8	Pernyataan 8	0,851	0,2940	Valid
9	Pernyataan 9	0,882	0,2940	Valid

Sumber: Data Primer, diolah (2023)

Berdasarkan tabel 3 hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen di dalam variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena $\text{corrected item-total correlation} > r_{\text{tabel}}$ pada signifikan 0,05 (5%)

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan secara statistik sama seperti halnya pengujian validitas data. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung Cronbach's Alpha dengan bantuan SPSS 25 for windows.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,818	0,70	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,838	0,70	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,907	0,70	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dari semua variabel digunakan untuk mengukur, variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,70.

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.27949692
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.106
	Negative	-.126
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer, diolah (2023)

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,073 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penilaian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penyajian Laporan Keuangan	.734	1.362
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.734	1.362

Sumber: Data Primer, diolah (2023)

Dari tabel 4.12, hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan adanya variabel independen (Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan) yang memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam regresi di penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.203	2.434		-.905	.371
Penyajian Laporan Keuangan	.150	.114	.230	1.317	.195

Aksesibilitas Laporan Keuangan	.026	.171	.027	.152	.880
--------------------------------	------	------	------	------	------

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Data Primer, diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai Sig. dari masing-masing variabel adalah sebesar 0,195 untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan, dan 0,880 untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai dari masing-masing variabel nilai Sig. lebih besar dari 0.05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

X₁ = Penyajian laporan keuangan

X₂ = Aksesibilitas laporan keuangan daerah

a = Konstanta

b₁,b₂ = Koefisien regresi

e = Error

Tabel 8. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.661	3.654		1.276	.009
Penyajian Laporan Keuangan	1.044	.171	.731	4.124	.002
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.073	.257	.034	3.286	.025

Berdasarkan tabel 8 hasil pengolahan data yang terlihat pada model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Akuntabilitas = 4,661+1,044 (penyajian laporan keuangan) + 0,074 (aksesibilitas laporan keuangan) + e

Koefisien konstanta bernilai positif menyatakan bahwa mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka apabila Penyajian Laporan keuangan mengalami peningkatan, maka Akuntabilitas mengalami peningkatan. Koefisien konstanta bernilai positif menyatakan bahwa mengasumsikan ketiadaan variabel lainnya, maka apabila Aksesibilitas mengalami peningkatan, maka Kinerja Anggaran mengalami peningkatan.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.755 ^a	.570	.550	2.226

a. Predictors: (Constant), Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 9, hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,755 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 75,5%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan diperoleh angka adjusted R square sebesar 0,550 atau sebesar 55,5% menunjukkan bahwa variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas

laporan mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sisanya sebesar 44,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Uji t yaitu untuk menguji hubungan regresi secara parsial dan pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Jika hasil perhitungan nilai signifikan $< \alpha = 0,05$, maka suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas setiap variabel. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- 2) Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

t tabel dapat diketahui sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t_{\text{tabel}} &= t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 45-2-1) \\ &= t(0,025; 42) \\ &= 2,018 \end{aligned}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel X

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.661	3.654		1.276	.009
Penyajian Laporan Keuangan	1.044	.171	.731	4.124	.002
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.073	.257	.034	3.286	.025

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Data Primer, di olah (2023)

Berdasarkan tabel 4.16 untuk pengujian statistik t diketahui bahwa nilai signifikansi variabel aksesibilitas yaitu 0,025 ($< 0,05$). Pada uji t tersebut menunjukkan nilai t hitung untuk variabel aksesibilitas adalah sebesar 3,286 sedangkan nilai t tabelnya adalah sebesar 2,018 ($3,286 > 2,018$). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Aksesibilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Hipotesis 2 diterima. Dapat dibuat kesimpulan bahwa semakin meningkat nilai Aksesibilitas maka nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkat.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F adalah jika nilai signifikansi $F < 0,05$, dan jika nilai f hitung $> f$ tabel, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. f_{tabel} dapat diketahui sebagai berikut:

$$f_{\text{tabel}} = f(k; n-k)$$

$$\begin{aligned} &= f(2; 45-2) \\ &= f(2; 43) \\ &= 3,214 \end{aligned}$$

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	292.171	2	146.086	26.837	.001 ^b
	Residual	228.629	42	5.444		
	Total	520.800	44			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Aksesibilita Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan

Sumber: Data Primer, diolah (2023)

Berdasarkan tabel ANOVA atau F Test, diperoleh nilai F hitung sebesar 26,837 dengan probabilitas 0,001. F hitung jauh lebih besar dibandingkan dengan f tabel ($26,837 > 3,214$) dan probabilitas jauh lebih kecil

dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembahasan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian ini, penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai koefisien penyajian laporan keuangan yang bernilai positif sebesar 1,044. Hasil pengujian hipotesis nilai t-tabel sebesar 2,018 dan t-hitung sebesar 4,124 dengan taraf signifikan sebesar 0,002 yang lebih kecil tingkat kesalahan (α) sebesar 5% atau 0,05 dan berdasarkan hasil rekapitulasi skor tanggapan responden yang telah dilakukan terhadap variabel penyajian laporan keuangan lebih dominan skor 4 atau setuju dengan jumlah sebesar 19,6% dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih dominan oleh skor 4 atau setuju dengan jumlah skor 26%, sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat daerah kota Mataram.

Penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam standar akuntansi pemerintah nomor 1 yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*). Menurut Permendagri No 64 Tahun 2013 tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan Teori Stewardship (Donaldson dan Davis, 1991) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik penyajian laporan keuangan, tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hehanussa (2015), Fauziah (2017) dan Masyhur (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan. Dan didukung dengan hasil Dasa (2019) dan Deviyani (2021) bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian ini, Aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai koefisien aksesibilitas laporan keuangan yang bernilai positif sebesar 0,073. Hasil pengujian hipotesis nilai t-tabel sebesar 2,018 dan t-hitung sebesar 3,286 dengan taraf signifikan sebesar 0,025 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) sebesar 5% atau 0,05. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi skor tanggapan responden yang telah dilakukan terhadap variabel aksesibilitas laporan keuangan lebih dominan skor 4 atau setuju dengan jumlah sebesar 11,4% dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih dominan oleh skor 4 atau setuju dengan jumlah skor 26%, sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat daerah kota Mataram.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pemerintah daerah dapat memberikan akses terhadap pengguna laporan keuangan secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan dengan mempublikasikannya melalui internet, surat kabar atau dengan cara lainnya. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk mengakses informasi laporan keuangan. Pemerintah Daerah harus membuka akses kepada masyarakat khususnya para pengguna laporan keuangan secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, maka ini merupakan cerminan dari teori stewardship yang menjelaskan eksistensi

stewards (pemerintah) sebagai lembaga yang dapat dipercaya serta bertindak sesuai dengan kepentingan publik.

Apabila pemerintah telah menyajikan laporan keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi masyarakat khususnya para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2018) dan Fahmi (2020) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah begitu juga hasil penelitian dari Ulfa & Rahayu (2020) dan Susilawati (2022) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat daerah kota Mataram. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas di bab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Penyajian Laporan Keuangan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Penyajian laporan keuangan secara lengkap dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Hasil penelitian Aksesibilitas laporan keuangan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Tetapi masih ada variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai persepsi pegawai negeri sipil Sekretariat Daerah Kota Mataram terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah setelah diterapkan SIPD yaitu SIPD merupakan suatu sistem berbasis online yang memberi kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dilihat dari segi waktu SIPD yang diterapkan menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat. DPA dan RKA juga merupakan output yang dihasilkan dalam sistem SIPD sehingga dalam penyajian laporan dan aksesibilitas laporan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Terlihat jelas bahwa pegawai di Sekretariat Daerah Kota Mataram merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat walaupun 60-70% pengguna sistem tersebut masih belum memahami jelas penginputannya, sehingga membutuhkan pengawasan lebih

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat daerah kota Mataram, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dalam mengambil sampel diharapkan tidak hanya OPD dilingkup badan dan dinas saja melainkan diharapkan melihat OPD tingkat kecamatan dan memperluas cakupan responden

- yakni tidak hanya Kasubbag keuangan dan Bendahara saja, melainkan mengikutsertakan kepala badan dan dinas masing-masing OPD agar penelitian dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.
2. Bagi masyarakat sebagai *principal* agar membantu mendeteksi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah
 3. Bagi instansi pemerintah Sekretariat Daerah Kota Mataram diharapkan dapat terus meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar mencapai pemerintahan secara akuntabilitas dan bertanggungjawab yang baik

REFERENSI

- Andiza Z. Arifin. 2014. *"Pengaruh Budaya Organisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Pada Rumah Sakit Daerah Massenrempulu, Kabupaten Enrekang)."*
- Dasa Febrianti, G. (2019). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palus.*
- Dedy Aries Poae & David P. E. Saerang. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud.*
- Dewi, A. C. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Fahmi, R. S. H. (2020). *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palopo (Studi pada Kantor BPKAD Kota Palopo).*
- Hafzan Fikrian. 2017. *"Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah KKota Pekanbaru)."*
- Manur Sitinjak, Y. H. M. A. (2019). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.*
- Mardhani Susilawati & Anik Malikhah & M. Cholid Maward. (2022). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Kota Malang Dan Kabupaten Malang).*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit UII Press
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta
- Mirza Masyhur. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai.*
- Mulyanto, (2020). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 digantikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Reza Fauziyah, M. (2017). *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Salomi J. Hehanussa. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon.*
- Senda Yunita Leatemia, P. U. (2021). *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Shinta Deviyani. (2021). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bogor.*

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cv.
- Ulfa Rosalia, A., & Rahayu, S. (2020). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019)*.
- Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV Bab VIII;
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Yenita, R. T. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kota Surabaya Anang Subardjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Yuliana Elita. 2017. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan."